

Konflik antar Elite Politik Lokal di Sulawesi Selatan: Sebuah Perspektif Sejarah

RESUME: Konflik elite merupakan kajian yang menarik di kalangan para ilmuwan dan praktisi sosial, sejak dahulu hingga sekarang. Konflik antar elite politik lokal juga senantiasa muncul dalam lanskap perpolitikan di Indonesia. Konflik antar elite politik lokal menjadi fenomena baru di era Reformasi (1988 – sekarang), yang jarang ditemukan pada masa-masa sebelumnya, baik pada masa Orde Lama (1959-1966) maupun pada masa Orde Baru (1966-1998). Penulisan ini bertujuan untuk menemukan adanya kontinuitas dan pergeseran pola konflik melalui penelusuran sejarah. Berdasarkan penelusuran sejarah, pengkajian dan analisis terhadap konflik antar elite politik lokal, baik pada zaman sebelum penjajahan, zaman penjajahan, maupun zaman kemerdekaan Indonesia (1945-1950), hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontinuitas dan pergeseran pola konflik elite dari setiap zaman di Sulawesi Selatan. Kontinuitas pola konflik dapat dilihat dari pertentangan antar suku/wilayah dalam perebutan kekuasaan, yang terjadi sejak zaman penjajahan sampai saat ini. Pergeseran pola konflik dapat dilihat dari perubahan konflik elite yang sebelumnya bersifat vertikal (kelompok bangsawan dengan masyarakat biasa) menjadi konflik horizontal, yakni konflik antar kelompok kepentingan yang tidak lagi didasarkan pada strata sosial, seperti yang terjadi masa-masa sebelumnya.

KATA KUNCI: Konflik antar elite, politik lokal, Sulawesi Selatan, sejarah konflik, kontinuitas, konflik vertikal, dan konflik horizontal.

ABSTRACT: "Conflicts among the Local Political Elites in South Sulawesi: A Historical Perspective". Conflict of elite is an interesting study for the social sciences experts and practitioners since the last time until the latest period. Conflict among the local political elites often appeared also in the political landscape of Indonesia. Conflicts among the local political elites have become a new phenomenon in the era of Reform (1998 to date) that is rarely found in the past, whether in the time of Old Order (1959-1966) or in the time of New Order (1966-1998). This research aims to discover the existence of continuity and shift pattern by tracing the history of the conflict. Based on the search, assessment, and analysis of the conflict between the local political elite, both in the period before the colonial, the era of colonial, and in the time of Indonesian independence (1945-1950), the results showed that there is continuity and shifting patterns of elite conflict from every age in South Sulawesi. Continuity patterns of conflict can be seen from the conflicts between tribes/regions in the seizure of power that occurred since colonial periods until today. Shifting patterns of conflict can be seen from the changes of elite conflicts that previously vertical (group of nobles with the common people) into the horizontal conflicts, the conflicts between interest groups that are not anymore based on social strata, as it did occur in the previously last times ago.

KEY WORD: Conflicts among the elites, local politics, South Sulawesi, conflict history, continuity, vertical conflict, and horizontal conflict.

PENDAHULUAN

Konflik elite merupakan kajian yang menarik di kalangan ilmuwan dan praktisi dalam era Reformasi. Salah satu aspek yang terkait dengan kajian ini adalah konflik antar elite politik lokal di Sulawesi Selatan, yang jarang ditemukan pada rezim sebelumnya (Orde Lama dan Orde Baru).

Pada rezim sebelumnya, konflik yang sering terjadi adalah konflik antar elite politik di pusat dengan masyarakat lokal, atau konflik antar elite politik di pusat. Elite politik di pusat kerap kali memaksakan keinginan politiknya dan tidak jarang aspirasi masyarakat diabaikan. Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, pemerintah pusat

About the Author: Dr. Jayadi Nas adalah Staf Pengajar pada FISIP UNHAS (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin) Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia. Untuk kepentingan akademik, penulis dapat dihubungi dengan alamat e-mail: jayadi.nas01@gmail.com

How to cite this article? Nas, Jayadi. (2014). "Konflik antar Elite Politik Lokal di Sulawesi Selatan: Sebuah Perspektif Sejarah" in *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol.7(2) November, pp.197-212. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, UNHAS Makassar, and UNIPA Surabaya, ISSN 1979-0112. Available online also at: <http://www.sosiohumanika-jpsk.com/index.php?lang=en&p=journal&act=viewjurnal2&id=154&postact=detail>

Chronicle of the article: Accepted (November 10, 2014); Revised (November 15, 2014); and Published (November 20, 2014).

mencengkeram daerah-daerah dengan jalan menempatkan orang-orangnya sendiri di provinsi-provinsi begitu revolusi Indonesia usai. Secara politik, kebijakan ini mendapat reaksi negatif dari beberapa tokoh di daerah, karena banyak tokoh daerah yang merasa berjasa pada masa revolusi (1945-1950) diabaikan oleh pemerintah pusat dan dicampakkan dari struktur kekuasaan setempat (Sjamsuddin, 1989b:23).

Pemerintah pusat juga lebih mengutamakan elite profesional di pusat daripada putra daerah, sedangkan masyarakat lokal menuntut putra daerah (Sjamsuddin, 1989:24). Dalam konteks ini, Gerald S. Maryanov menilai bahwa elite pusat telah mengklaim dirinya sebagai aktor utama dalam mengidentifikasi setiap permasalahan dan merumuskan pemecahannya (Maryanov, 2000:55). Aspirasi masyarakat kurang diperhatikan dan pengambilan keputusan dilakukan secara sentralistik.

Sentralisasi kekuasaan dilakukan oleh elite pusat dengan pertimbangan terjadinya serangkaian gejala politik yang membahayakan keutuhan nasional, seperti gerakan Permesta (Perjuangan Sementara) di Sulawesi dan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera pada tahun 1957-1958. Menurut Maswadi Rauf, pergolakan daerah tersebut sebenarnya tidak ingin memisahkan diri dari RI (Republik Indonesia), tetapi lebih merupakan protes terhadap perkembangan politik pada tingkat pusat dan ketidakpuasan beberapa daerah terhadap penanganan hubungan pusat-daerah oleh pemerintah pusat, yang dianggap lebih menguntungkan Jakarta (Rauf, 2000:119).

Menurut Nick Devas *et al.*, pergolakan yang dilakukan oleh daerah bukan tanpa alasan. Ada dua alasan sehingga daerah melakukannya, yakni: *pertama*, ungkapan perasaan kedaerahan; dan *kedua*, ungkapan rasa tidak puas dengan kehidupan politik (Devas *et al.*, 1999). Kritik lainnya dikemukakan oleh Barbara S. Harvey, bahwa pertimbangan dan kecurigaan pemerintah pusat terlalu berlebihan dan kurang realistis. Pergolakan yang dilakukan oleh daerah

hanya pemberontakan setengah hati. Oleh karena itu, tidak pernah terlintas di benak para tokoh pemberontak untuk memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), yang kelahirannya mereka sendiri ikut memperjuangkan (Harvey, 1989).

Pada tahun 1970-an, pemerintah Orde Baru (1966-1998) memprioritaskan stabilitas politik dengan menggunakan militer dalam jabatan birokrasi, khususnya jabatan gubernur sebagai kepala daerah. Sebanyak 20 dari 26 gubernur diangkat dari kalangan militer, 13 dari 20 gubernur diangkat untuk masa jabatan lima tahun kedua, yang lebih menanamkan pengaruh militer (Malley, 2001:132).

Pasca runtuhnya Orde Baru dan lahirnya era Reformasi (1998 – sekarang), muncul suatu fenomena baru di Sulawesi Selatan, yakni munculnya konflik antar elite lokal, terutama dalam pemilihan umum, baik untuk legislatif, Pilpres (Pemilihan Presiden) maupun Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Fenomena ini menarik ditelusuri secara historis. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan diuraikan konflik antar elite politik di Sulawesi Selatan, mulai dari zaman sebelum penjajahan, zaman penjajahan, dan zaman kemerdekaan.

KONFLIK ANTAR ELITE POLITIK LOKAL SEBELUM PENJAJAHAN

Sebelum kedatangan *Tumanurung* pada awal abad XIV, Sulawesi Selatan diwarnai dengan konflik antar kaum atau kelompok kaum. Setiap individu atau kelompok bersaing, bertengkar, dan melakukan perang dengan individu atau kelompok lainnya. Terjadi persaingan antar kelompok dalam mempertahankan kelompoknya, memperluas kekuasaan, dan merebut hegemoni kekuasaan (Paeni *et al.*, 2002).

Penyebab utama terjadinya konflik antar kelompok adalah tidak adanya elite sentral yang dapat menjadi pemersatu dari setiap kelompok (Geertz *ed.*, 1965; dan Sjamsuddin, 1989a). Di *Tana Gowa*, misalnya, sembilan negeri saling bersaing dan melakukan perang satu sama lain. *Paccalayya*, yang diharapkan dapat menciptakan kedamaian

dan ketertiban, tidak memiliki wibawa dan kemampuan. Akibatnya, konflik antar negeri terjadi terus-menerus dan rakyat menjadi korban (Abdullah, 1985:74; dan Mattulada, 1998:112-113).

Dalam kondisi konflik yang terjadi secara terus-menerus, dan kehidupan rakyat diwarnai dengan kekacauan dan putus asa, rakyat memohon kepada Tuhan agar didatangkan seorang elite pemersatu. Elite itu diharapkan dapat menjadi elite sentral yang akan memimpin dan melindunginya. Permohonan rakyat itu dikabulkan dengan diturunkannya seorang elite yang sering disebut dengan *Tumanurung* (Paeni *et al.*, 2002).

Pada abad XV - XVI, terjadi persaingan antar negeri-negeri atau kerajaan lokal dalam memperebutkan hegemoni kekuasaan. Negeri-negeri yang melakukan persaingan itu pada umumnya adalah negeri-negeri orang Bugis dan Makassar. Terjadi konflik antar elite di wilayah Gowa (Makassar) dan Bone (Bugis), baik yang bersifat internal maupun eksternal (Abidin, 1999; dan Andaya, 2004).

Di wilayah Gowa, sekitar tahun 1510-1593, terjadi berbagai konflik antar elite politik. Raja Gowa ke-9, Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tumapa'risi Kallonna (1510-1546), melakukan ekspansi dengan memperluas wilayah kekuasaannya di luar sembilan negeri asal, *Bate Salapang*. Konflik juga terjadi ketika Raja Gowa ke-10, I Mario-Gau Daeng Bonto Karaeng Lakiung, Tunipallangga Ulaweng (1546-1566), melakukan perluasan kekuasaan politiknya dengan menyerang *Tana Bone* (Andaya, 2004).

Raja Gowa ke-10, yang wafat, digantikan oleh adiknya, I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatta, menjadi Raja Gowa ke-11. Dalam masa kepemimpinannya, Raja Gowa ke-11 tidak menyetujui perjanjian yang sudah dibuat. Konflik berlanjut kembali, penyerangan dilakukan terhadap *Tana Bone* yang dipimpin oleh Raja Gowa ke-11 sampai ia wafat dalam peperangan. Pasukannya mundur dan kembali ke Gowa (Mattulada, 1998; dan Hamid *et al.*, 2005).

Pada masa kepemimpinan Raja Gowa ke-12, I Manggorai Daeng Mammeta, Karaeng

Bontolangkasa Tunijallo (1565-1590), sempat terjadi perdamaian dengan kerajaan Bone. Namun sepuluh tahun kemudian, konflik terjadi lagi ketika kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng bersatu untuk melawan kerajaan Gowa. Dalam perang itu, Raja Gowa meninggal dunia dalam upayanya menyerang kerajaan Wajo (Andaya, 2004; Hamid *et al.*, 2005; dan Mappangara, 2014).

Raja Gowa diganti oleh putranya, I Tepe Karaeng Daeng Parabbung Tunijallo, menjadi Raja Gowa ke-13. Masa kepemimpinannya dinilai tercela dan banyak membuat masalah, seperti memecat tokoh-tokoh kerajaan, mengurangi kekuasaan *Bate Salapang*, dan banyak pedagang meninggalkan Gowa. Atas kepemimpinannya yang dianggap tidak terpuji, akhirnya musyawarah Dewan Kerajaan bersama *Bate Salapang* memecatnya atau *nipasulu'* (Andaya, 2004).

Kerajaan Gowa mengalami kemerosotan hingga akhir abad XVI. Sampai abad XVII, konflik antara Kerajaan Gowa dengan Kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng berlanjut sampai Portugis datang melakukan penaklukan. Konflik yang dilakukan oleh elite di Kerajaan Gowa, dalam upayanya memperluas kekuasaan, juga dilakukan oleh elite di Kerajaan Bone pada abad XVI.

Raja Bone (*Arumpone*) ke-5, La Tenrisukki Mappajunngi (1508-1535), melakukan penaklukan terhadap kerajaan Luwu dan Negeri Mampu. Raja Luwu sepakat melakukan perdamaian dan persaudaraan (*sipakatau*) yang disebut *Ulu-Ada PolomalelaE*. Negeri Cenrana diserahkan sebagai wilayah kekuasaan *Tana Bone* dan sepakat menjalin persaudaraan yang sederajat dan saling menghormati (Mas'ud Rahman, 1988; Abidin, 1999; dan Andaya, 2004).

Suasana kedamaian tidak bertahan lama, konflik kembali terjadi ketika Raja Bone ke-7, La Tenrirawe Bongkanngi, Matinro ri Gucina (1560-1578), melakukan perlawanan terhadap serangan kerajaan Gowa dan Luwu. Peperangan yang berlangsung sekitar 10 tahun itu dimenangkan oleh kerajaan Bone. *Tana Bone* mengalami masa konsolidasi dan peningkatan pertahanan yang amat kuat. *Tana Bone* dijadikan sebagai

negeri utama orang Bugis (Mattulada, 1975; Pelras, 1996; dan Hamid *et al.*, 2005).

Pada saat La Tenrirawe Bongkanngge, Matinro ri Gucina wafat, ia digantikan oleh adiknya, La Ica, MatinroE ri Addenema, menjadi Raja Bone ke-8 (1578–1589), karena tidak mempunyai keturunan. Masa kepemimpinan La Ica, MatinroE ri Addenema, dianggap tercela. Kedamaian yang diciptakan oleh La Tenrirawe Bongkanngge, Matinro ri Gucina tidak dapat dipertahankan, muncul kembali konflik dengan kerajaan Gowa. Tindakannya sebagai raja melampaui batas hak sebagai raja, sehingga Dewan Kerajaan *Tana Bone* menurunkan dari tahta kerajaan. Ia digantikan oleh La Pattawe', MatinroE ri Bettung, menjadi raja Bone ke-9 (1589–1596) dan menutup abad XVI (Andaya, 2004).

Uraian tentang konflik antar elite politik di Sulawesi Selatan, baik di Bone maupun di Gowa, menunjukkan bahwa dalam upaya memperluas wilayah kekuasaannya, elite politik melakukan penaklukan. Dalam melakukan ekspansi kekuasaan, konflik antar elite tidak dapat dihindari. Setiap elite, bersama dengan pasukannya, melakukan peperangan terhadap wilayah lain (Pababbari, 2003; dan Sewang, 2005).

Disamping terjadi konflik antar elite politik, juga terdapat konsensus politik. Elite yang kekuatannya tidak mampu melawan, lebih memilih damai dengan cara melakukan konsensus. Adapun konsensus yang biasa disepakati adalah ditetapkannya perjanjian untuk bergabung sebagai wilayah taklukan dan mendapatkan perlindungan dari serangan wilayah lain. Sepakat melakukan perdamaian dan persaudaraan untuk saling mengormati. Dalam realitasnya, konsensus yang sudah disepakati diingkari oleh generasi penerusnya, sehingga konflik terjadi lagi. Kondisi itu berlanjut sampai masa penjajahan (Mappangara, 2014; dan Sulisty, 2014).

KONFLIK ANTAR ELITE POLITIK PADA MASA PENJAJAHAN

Konflik antar elite politik pada masa penjajahan di Sulawesi Selatan dibagi dalam tiga babakan sejarah. *Pertama*, konflik

antar elite politik pada abad XVII, konflik antara Sultan Hasanuddin dengan Arung Palakka. *Kedua*, konflik antar elite politik pada abad XVIII yang diwarnai persaingan antara kekuatan sekutu Bone-Soppeng yang dipimpin Arung Palakka dengan sekutu Gowa-Wajo yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Ali. *Ketiga*, konflik antar elite politik pada abad XIX - XX, konflik antar raja-raja sebagai akibat politik adu domba kolonial Belanda.

Pada abad XVII (1605), wilayah Sulawesi Selatan diwarnai dengan konflik antar dua elite utama, yakni Sultan Hasanuddin dengan Arung Palakka (Abdullah, 1985; Mattulada, 1998; Abidin, 1999; dan Andaya, 2004). Sultan Hasanuddin adalah Raja Gowa (sering disebut Kerajaan Makassar) tersohor, yang hampir menguasai seluruh wilayah Indonesia kawasan Timur. Ia adalah tokoh yang dipandang moderat, berani, dan tegas. Sedangkan Arung Palakka adalah tokoh Bugis yang dikenal kuat dan konsisten menghadapi dan mengatasi masalah-masalah pelik. Keduanya bersaing memperebutkan pengaruh di Sulawesi Selatan (Mappangara, 2014; dan Sulisty, 2014).

Berbagai upaya dilakukan Arung Palakka, bersama pasukannya, dalam melawan kekuatan Sultan Hasanuddin, di antaranya mengajak *Datu Soppeng*, Raja Wajo, dan Sultan Buton. Upaya yang dilakukan nampaknya tidak kuat untuk melawan kerajaan Gowa, bahkan kerajaan Wajo mendukung Sultan Hasanuddin. Berkali-kali dilakukan penyerangan selalu gagal, sampai Arung Palakka melarikan diri dan bersembunyi di pulau Buton (Andaya, 2004).

Menyadari pasukannya tidak kuat melawan kerajaan Gowa, maka pada bulan November 1663, Arung Palakka bersama pasukannya meninggalkan Buton menuju Batavia (sekarang Jakarta) untuk bertemu dengan pihak kompeni Belanda. Pihak Belanda menerima dengan senang hati keinginan Arung Palakka menjadi sekutu untuk mencapai tujuan bersama, yakni melakukan perang dan menaklukkan kerajaan Makassar atau Gowa (Abdullah, 1985).

Mendengar Arung Palakka bersekutu dengan pihak kompeni Belanda, Sultan Hasanuddin marah dan mengutus *Karaeng Sumana* untuk menyampaikan suratnya. Isi surat tersebut adalah sebagai berikut:

Tidak mengakui penyerahan pulau Pansiane (pulau Muna) oleh Ternate kepada Sultan Buton, karena pulau itu masih menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Makassar. Dinyatakan juga bahwa Banggai dan Bungku yang dituntut oleh Sultan Ternate adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Makassar, yang tak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Ditekankan secara lebih keras agar VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*), atau kompeni Belanda, mengusir orang Bugis dari Batavia, karena mereka itu adalah penjahat-penjahat yang memberontak terhadap kekuasaan Kerajaan Makassar (dalam Mattulada, 1998:173).

Surat Sultan Hasanuddin itu dijawab oleh pihak Belanda bahwa: (1) Sengketa dalam kalangan kerajaan-kerajaan lokal antara Makassar, Buton, dan Ternate, sesuai dengan perjanjian, tidak akan dicampuri oleh Belanda; serta (2) Pangeran-pangeran Bugis yang ada di Batavia adalah sahabat-sahabat VOC/Belanda, yang juga tidak selayaknya dicampuri oleh Kerajaan Makassar. Mereka tidak merugikan Kerajaan Makassar selama bermukim di Batavia (Mattulada, 1998:173).

Pada tanggal 20 Desember 1666, di Benteng Somba Opu, Sultan Hasanuddin menerima utusan dari Admiral Speelman, yang membawa sepucuk surat berisi tuntutan dan ancaman. Surat itu dipahami oleh Sultan Hasanuddin sebagai pembuka jalan untuk memulai perang secara terbuka. Oleh karena itu, Sultan Hasanuddin membuat surat balasan yang berisi, sebagai berikut:

Bila kami diserang, kami akan mempertahankan diri, dan kami akan menyerang kembali, dengan segala kemampuan yang ada. Kami berada dalam pihak yang benar, tetapi kami diserang. Kami akan mempertahankan kebenaran dan kemerdekaan negeri kami (dalam Mattulada, 1998:181).

Surat itu dibawa oleh dua orang bangsawan utusan Kerajaan Makassar. Utusan itu terkejut ketika dipertemukan

dengan Arung Palakka yang berpakaian Perwira Belanda dan mengenakan kalung medali emas pemberian Belanda. Utusan Kerajaan Makassar itu kemudian melaporkan kepada Sultan Hasanuddin tentang pertemuannya dengan Arung Palakka. Pihak Kerajaan Makassar dan seluruh rakyat semakin marah dan siap melakukan perlawanan. Pada tanggal 21 Desember 1666, pasukan Belanda bersama Arung Palakka melakukan serangan dan perang pun dimulai. Sultan Hasanuddin mengerahkan segala kemampuan pasukannya untuk melakukan perlawanan (Abdullah, 1985; Mattulada, 1998; Abidin, 1999; dan Andaya, 2004).

Arung Palakka mengirim pasukan perintis untuk mengobarkan semangat perlawanan orang Bone dan Soppeng terhadap Kerajaan Makassar. Pasukan Arung Palakka bergabung dengan Belanda untuk melakukan penyerangan ke Makassar, baik melalui darat maupu laut. Pada tanggal 22 Oktober 1667, terjadilah perang Makassar yang dianggap sebagai perang paling dahsyat yang pernah terjadi di Nusantara. Dahsyatnya perang Makassar itu dapat dilihat dari banyaknya korban dari kedua belah pihak (Mattulada, 1998; dan Andaya, 2004).

Pasukan Kerajaan Makassar mengalami kekalahan dan dikepung di setiap penjuru. Melihat kondisi yang tidak menguntungkan, Sultan Hasanuddin melakukan penanda-tanganan. Penanda-tanganan perjanjian itu menimbulkan reaksi dari berbagai elite, baik di kalangan elite Kerajaan Makassar maupun elite di kalangan sekutu kerajaan. Di kalangan elite Kerajaan Makassar, *Karaeng Karunrung* (Mangkubumi, seorang tokoh besar kerajaan) menentang dengan keras Perjanjian Bungaya. Reaksi yang sama dilakukan oleh elite di kalangan *Bate Salapang*, yang tidak memberikan persetujuan. Ia mendesak Sultan Hasanuddin agar membatalkan perjanjian (Mattulada, 1998).

Tingginya penolakan dan kerasnya sikap dari berbagai elite menyebabkan perang pasca Perjanjian Bungaya tidak dapat dihindari. Dibawah pimpinan *Karaeng*

Karunrung, pasukan kerajaan Makassar melakukan penyerangan terhadap markas Belanda (*Fort Rotterdam*) dan Arung Palakka sempat mengalami luka-luka. Peperangan itu menelan korban dari kedua belah pihak.

Sultan Hasanuddin, yang menghindari korban semakin banyak dan melihat kekuatan yang tidak seimbang, lebih memilih perdamaian. Memohon kepada semua elite dan pasukannya agar kembali ke negerinya masing-masing. Namun demikian, sejumlah elite kerajaan tetap tidak menyetujui hasil dari Perjanjian Bungaya. Terjadi konflik di kalangan elite kerajaan Makassar yang membuat Sultan Hasanuddin mengundurkan diri pada tanggal 29 Juni 1669 dan digantikan oleh putranya, Sultan Amir Hamzah. Dalam hal tingginya penolakan dari berbagai elite terhadap Perjanjian Bungaya, Arung Palakka berkata kepada Sultan Hasanuddin, sebagai berikut: "Perang kita (Bone dengan Gowa) telah selesai *Karaeng*, akan tetapi perang dengan keluarga kita (*Arung Matoa Wajo' To Sengeng*) belum selesai" (dalam Mattulada, 1998:215). Konflik antar elite tetap berlanjut sampai memasuki abad XVIII.

Terjadi konflik antar elite di antara dua kekuatan yang saling bersaing merebut pengaruh dalam masyarakat. Kekuatan sekutu Bone - Soppeng yang dipimpin oleh Arung Palakka bersaing dengan kekuatan sekutu Gowa - Wajo yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Ali.

Arung Palakka bersama pasukannya, yang memenangkan perang Makassar, menduduki berbagai wilayah pemukiman. Arung Palakka menjadikan kawasan Bontoala sebagai daerah pemukiman bersama segenap pasukan perang untuk merencanakan strateginya dalam menguasai wilayah-wilayah di seluruh Sulawesi Selatan. Kawasan Bontoala berhadapan dengan *Fort Rotterdam* (markas Belanda), sehingga sangat strategis untuk mendapatkan bantuan perang apabila sewaktu-waktu mendapat serangan.

Hubungan antara pemerintah kolonial Belanda yang dipimpin oleh Admiral Speelman dengan pemerintahan Arung Palakka sangat erat. Namun hubungan

itu lambat-laun menjadi renggang ketika Speelman kembali ke Batavia dan digantikan oleh penerusnya yang kurang akrab. Arung Palakka bergerak mengkonsolidasikan pasukannya dalam upaya menyatukan negeri-negeri Sulawesi Selatan, yang disebutnya *Tana Sempugi* (negeri seketurunan) ke dalam satu kesadaran baru, yaitu kesadaran teritorial Sulawesi Selatan (Andaya, 2004).

Dalam upayanya menyatukan negeri-negeri di Sulawesi Selatan menjadi satu, Arung Palakka melakukan dua strategi. *Pertama*, menyelesaikan hubungan dengan elite atau kaum bangsawan yang belum ikut menandatangani Perjanjian Bungaya. Bagi elite yang tetap pada pendiriannya dilakukan dengan cara peperangan atau penaklukan. *Kedua*, menjalin hubungan erat dengan segenap elite di setiap negeri-negeri di Sulawesi Selatan melalui pernikahan atau *marriage diplomacy*. Strategi itu dimaksudkan untuk mencapai satu lapisan pemimpin kekuasaan Sulawesi Selatan, yang memiliki hubungan darah atau *siri'* dan solidaritas kebersamaan atau *pacce* (Marzuki, 1995; dan Hamid *et al.*, 2005). Dalam tempo sekitar dua tahun, hampir segenap negeri di Sulawesi Selatan dapat dikendalikan oleh Arung Palakka bersama kolonial Belanda.

Keberhasilan yang dicapai oleh Arung Palakka itu mendapat rintangan dari berbagai elite bangsawan dan sekelompok pemimpin kerajaan di Gowa dan Bone. Sekumpulan orang terkemuka di Gowa menculik tiga orang wanita di istananya. Peristiwa itu merupakan penghinaan terhadap diri dan kekuasaan Arung Palakka, atau pelanggaran *siri'* yang besar. Arung Palakka ingin melakukan penyerangan kepada kerajaan Gowa, namun tidak diizinkan oleh Belanda, yang sedang mengalami kebangkrutan (Mattulada, 1998; dan Andaya, 2004).

Rintangan lain yang dilakukan oleh lawan politik Arung Palakka justru ada di Bone sendiri. Putera La Maddaremmeng, yaitu Arung Timurung La PakkokoE, yang merasa kekuasaannya terancam, melakukan perlawanan. Arung Timurung La PakkokoE dan pasukannya meninggalkan

Bone menuju pegunungan *Tana Toraja*. Sikap yang diperlihatkan oleh Arung Timurung La PakkokoE merupakan bentuk ketidaksetujuan terhadap kepemimpinan Arung Palakka.

Menghadapi perlawanan Arung Timurung La PakkokoE yang didukung oleh beberapa elite bangsawan Bone dan Gowa, Arung Palakka memerintahkan Arung Bakke' Tudani untuk mengirim pasukannya. Arung Palakka juga meminta bantuan dari Belanda dalam melakukan penyerangan. Dalam meyakinkan rakyat Sulawesi Selatan, Arung Palakka memimpin langsung penyerangan terhadap Arung Timurung La PakkokoE, yang dianggap melanggar *siri'* dan *pacce* (Marzuki, 1995; dan Hamid *et al.*, 2005). Penyerangan yang didukung oleh pasukan yang kuat dan besar dengan mudah menaklukkan Arung Timurung La PakkokoE, yang juga didukung oleh sekutunya di Mandar, yaitu Karaeng Massepe'.

Atas kemenangan yang dicapai dalam penyerangan Arung Timurung La PakkokoE, Arung Palakka dan *Datu Soppeng* memerintahkan agar Arung Timurung La PakkokoE dan *Punggawa Daeng Pabila* dari Bone dihukum mati. Arung Timurung La PakkokoE, yang merupakan adik ipar Arung Palakka, mendapat perlindungan dan diringankan hukumannya. Arung Palakka juga memerintahkan dengan keras kepada Raja Gowa, Sultan Amir Hamzah, agar memberhentikan Karaeng Karunrung, Karaeng Jarantika, dan Gallarang Manngasa dari jabatan kekuasaan mereka.

Kedua raja tersebut (Arung Palakka dan Sultan Amir Hamzah) menjalin keakraban dan sepakat menciptakan perdamaian. Keakraban kedua raja itu justru menimbulkan kecurigaan dari pihak Belanda. Keakraban antara Arung Palakka dan Sultan Amir Hamzah berlangsung sampai Raja Gowa itu wafat pada tanggal 7 Mei 1674 dan digantikan oleh Sultan Muhammad Ali. Terjadinya, pergantian Raja Gowa juga merenggangkan kembali hubungan dengan Arung Palakka. Sultan Muhammad Ali kurang menyukai

kepemimpinan Arung Palakka dan melakukan perbuatan asusila di istana. Sultan Muhammad Ali dan pengikutnya melakukan pemerkosaan terhadap wanita (*tumasiri*) di dalam istana Arung Palakka (Mattulada, 1998; dan Andaya, 2004).

Arung Palakka yang merasa dinodai harkat dan martabatnya oleh Sultan Muhammad Ali dan pengikutnya menyerang kerajaan Gowa untuk yang kedua kalinya. Sultan Muhammad Ali dan pengikutnya menyerahkan diri dan meminta perlindungan dari pihak Belanda di *Fort Rotterdam*. Pihak Belanda memberikan perlindungan dan seolah-olah meminta Sultan Muhammad Ali agar ke pulau Jawa menggalang kekuatan bersama lasykar Gowa yang dipimpin oleh Karaeng Galesong dan Daeng Tulolo, kemudian melakukan perlawanan terhadap Arung Palakka di Sulawesi Selatan (Mukhlis ed., 1986; dan Kesuma, 2004).

Perlindungan yang diberikan oleh pihak Belanda kepada Sultan Muhammad Ali membuat Arung Palakka marah. Sikap Belanda itu nampaknya berlanjut ketika Arung Palakka, yang sudah semakin tua, ingin menyerahkan tampuk kekuasaannya pada La Patau. Pihak Belanda tidak menyetujui La Patau dan mengusulkan Arung Bakke Dani (adik ipar Arung Palakka) sebagai sosok yang cocok menggantikannya sebagai pemimpin di Sulawesi Selatan. Arung Palakka tidak setuju dan terjadilah konflik antara Arung Palakka dengan Arung Bakke Dani.

Sesuai dengan amanatnya, Arung Palakka digantikan oleh La Patau sebagai Raja Bone, yang dilantik pada tanggal 5 April 1696. La Patau meneruskan kepemimpinan Arung Palakka untuk tetap menjaga Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan wilayah (*Tana Sempugi*). Dalam realitasnya, La Patau tidak sekuat Arung Palakka, elite terpecah-pecah ke dalam negerinya masing-masing dan berhak mengambil sikap dan pendapat sendiri (Mattulada, 1998; dan Andaya, 2004).

Pada tahun 1709, terjadi konflik antara Arumpone La Patau (Raja Bone) dengan Sultan Ismail (Raja Gowa). Arumpone La Patau menuntut agar putera keduanya, La

Padangsajati, yang melakukan pelanggaran *siri'* menyangkut masalah perempuan diserahkan ke Bone untuk menjalani hukuman, namun ditolak oleh Sultan Ismail (Muhtamar, 2004). Pemerintah Belanda memberikan dukungan pada sikap Sultan Ismail, tetapi dibalik itu juga mendorong Arumpone La Patau untuk melakukan tekanan terhadap pembangkangan Raja Gowa. Akibatnya "perang keluarga" antara Arumpone La Patau (orang tua) dengan Sultan Ismail (anak) tidak dapat dihindari. Konflik antara Arumpone La Patau dengan Sultan Ismail lebih merupakan hasil politik "adu domba" penjajah Belanda dalam upayanya menguasai Sulawesi Selatan. Konflik itu terjadi sepanjang akhir abad XVIII dan berlangsung sampai abad XIX (Mattulada, 1998; dan Andaya, 2004).

Pada abad XIX, kehidupan elite politik senantiasa diperhadapkan pada pilihan yang serba sulit. Di satu sisi harus patuh pada kekuasaan Belanda, di sisi lain melawan Belanda dengan konsekuensi menjadi buronan yang tidak memiliki tempat yang aman, tetapi memiliki kemerdekaan. Pilihan yang serba sulit itu membuat elite politik terpolarisasi, ada elite yang rela bekerjasama dengan penjajah dan ada yang melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Berbagai konflik antar elite yang terjadi selama abad XIX senantiasa dimenangkan oleh elite yang pro pada penjajah karena mendapat dukungan Belanda. Pada bulan Desember 1812, terjadi konflik antara Arumpone Tu-Appatunru' Arung Palakka dengan Karaeng Pangkajene yang disetujui pengangkatannya oleh Belanda. Arumpone Tu-Appatunru' Arung Palakka tidak senang dengan Karaeng Pangkajene yang diangkat menjadi raja. Ia beranggapan Raja Gowa yang sah adalah Arung Mampu. Alat pusaka (*sudanga*) diserahkan kepada Arung Mampu.

Pasukan Arumpone Tu-Appatunru bersama Arung Mampu melakukan penyerangan terhadap kerajaan Gowa untuk mengusir Karaeng Pangkajene. Penyerangan itu tidak berhasil, karena Karaeng Pangkajene mendapat bantuan dari balatentara Inggris, yang menggantikan kekuasaan Belanda.

Pada bulan Agustus 1819, juga terjadi konflik antara Karaeng Data yang didukung oleh Inggris dengan Raja Gowa, Karaeng Lembang Parang, yang dibantu oleh Belanda. Karaeng Data bersama 2,000 orang lasyarnya berusaha menguasai daerah selatan Gowa dan memisahkan dengan daerah bagian utara. Masyarakat di bagian selatan yang dikuasai oleh Belanda dan bagian utara dikuasai oleh Gowa masih mempunyai ikatan kekerabatan (*pacce*), sehingga Karaeng Lembang Parang (Raja Gowa) dibantu oleh Belanda dan lasykar Addatuang Sidenreng dalam melakukan serangan terhadap Karaeng Data. Pertempuran berlangsung sengit, dengan kemenangan Raja Gowa dan kembalinya Belanda berkuasa.

Kemenangan yang dicapai oleh Raja Gowa membuat hubungan dengan pemerintah kolonial Belanda semakin baik. Dalam kondisi yang penuh perdamaian itu dimanfaatkan oleh elite-elite bangsawan dan pemimpin setiap kerajaan di Sulawesi Selatan untuk memperbaharui isi Perjanjian Bungaya. Setelah melalui perundingan antara elite Sulawesi Selatan dengan pemerintah kolonial Belanda, tanggal 27 Agustus 1824 disepakatilah Perjanjian Bungaya yang Diperbaharui (Latif, 2014).

Perjanjian Bungaya yang Diperbaharui itu tidak diterima oleh Raja Bone, sehingga pihak pemerintah kolonial Belanda melakukan penyerangan terhadap Bone, sampai Raja La Mappangara menyerah dan meminta pengampunan dari *Gubernemen* Belanda pada tahun 1833. Semua kerajaan praktis dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda dan mendirikan benteng-benteng pertahanan di seluruh Sulawesi Selatan.

Keberhasilan pemerintah kolonial Belanda menaklukkan kerajaan dan membangun benteng pertahanan di seluruh Sulawesi Selatan menyebabkan kekuatan kerajaan-kerajaan lokal semakin menurun. Konflik yang selama ini terjadi, baik dengan pihak kolonial Belanda maupun antar sesama kerajaan di Sulawesi Selatan, membuat kekuatan pertahanan mengalami kelumpuhan. Suatu hal yang wajar kalau pemimpin setiap kerajaan di Sulawesi

Selatan memilih tunduk pada penjajah, sambil menyusun strategi perlawanan.

Lumpuhnya kekuatan setiap kerajaan dan adanya ikrar bersama untuk patuh pada Perjanjian Bungaya yang Diperbaharui, membuat konflik antar elite politik di Sulawesi Selatan semakin menurun. Konflik antar elite lokal yang berkategori besar, seperti yang terjadi pada abad XVII dan XVIII, praktis tidak muncul ke permukaan. Konflik elite yang terjadi lebih bersifat internal kerajaan dan dapat dikategorikan tidak berarti.

Konflik antar elite yang terjadi di internal kerajaan pun bersifat temporer, yakni pada saat pergantian kekuasaan. Pertengahan abad XIX, di Kerajaan Wajo terjadi konflik antara dua orang bersaudara se-bapak untuk menduduki takhta kekuasaan di Sidenreng. La Panguriseng, yang sudah menjabat sebagai *Addatuang Sidenreng*, berkonflik dengan saudaranya yang bernama La Patongai Datu Lempulle', yang berusaha merebut kekuasaannya.

Konflik antar elite di internal kerajaan senantiasa mewarnai setiap pergantian kekuasaan. Terjadi persaingan antar elite dalam menduduki takhta kerajaan, sehingga kerap kali konflik kekerasan tidak dapat dihindari. Kondisi itu berlangsung sampai awal abad XX. Memasuki abad XX, konflik antar elite politik di Sulawesi Selatan dapat dikatakan tidak nampak, bahkan ada kecenderungan untuk bersatu melawan penjajah (Belanda). Strategi itu terungkap ketika pihak pemerintah kolonial Belanda mendapatkan dokumen-dokumen yang berisi hasil mufakat raja-raja dan elite bangsawan Bone, Gowa, Sidenreng, dan Wajo untuk melakukan perlawanan bersama kepada penjajah Belanda.

Terjadi gerakan perlawanan yang dilakukan setiap kerajaan terhadap pemerintah *Gubernemen* Belanda. Di Bone, perlawanan dilakukan oleh Arumpone La Pawawoi Karaeng Segeri, bersama pasukannya, pada tahun 1905-1908. Perlawanan yang sama dilakukan oleh Raja Gowa, Sultan Husain I Makkulau Karaeng Lembang Parang, bersama pasukannya. Gerakan perlawanan yang dilakukan

tidak mampu mengalahkan kekuatan penjajah Belanda, yang dilengkapi dengan persenjataan modern.

Setelah perang tahun 1905-1908 berakhir dan dibentuknya pemerintahan Hindia Belanda, stabilitas politik secara perlahan menunjukkan perkembangan. Kegiatan ekonomi mulai bangkit, petani menanam padi, jagung, dan umbi-umbian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas perdagangan antar pulau mulai bergerak. Disamping itu, rakyat sudah bisa mendapatkan pendidikan, walaupun itu masih terbatas pada golongan bangsawan atau keturunan bangsawan (Depdikbud RI, 1985; dan Poelinggomang, 2004).

Penataan pemerintahan yang dilakukan oleh Hindia Belanda mengalami masalah ketika tentara Jepang menduduki Sulawesi Selatan pada tahun 1942. Kekuasaan pemerintahan Jepang mengusir Belanda dan melakukan perubahan secara cepat. Nama jabatan, pemerintahan, dan daerah diubah dengan memakai bahasa Jepang. Demikian halnya dengan gelar yang diberikan kepada elite bangsawan, seperti raja-raja *zelfbestuur* (swapraja) diubah menjadi *su-cho*, pejabat bawahan yang disebut *adat-gemeenschap* atau distrik diubah menjadi *gun-cho* (Mattulada, 1998:413).

Pemerintahan pendudukan Jepang berlangsung sekitar tiga tahun di Sulawesi Selatan. Selama pemerintahan Jepang (1942-1945), praktis tidak terjadi konflik antar elite politik lokal. Elite politik cenderung bersatu melawan Jepang yang dianggap sangat biadab dan kejam melakukan penindasan di Sulawesi Selatan. Perlawanan rakyat berlangsung terus-menerus sampai Sekutu berhasil membuat tentara Jepang bertekuk lutut dan Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945.

KONFLIK ANTAR ELITE POLITIK LOKAL PADA ZAMAN KEMERDEKAAN

Pada awal kemerdekaan, elite politik lokal berbeda pandangan satu sama lain dalam menanggapi proses perjuangan pasca kemerdekaan, baik karena perbedaan antar pimpinan maupun aliran. Setiap elite politik bersaing untuk mendapatkan kekuasaan,

demikian halnya dengan kelompok kepentingan atau aliran-aliran politik yang ada. Dalam bagian ini akan diuraikan konflik antar elite politik lokal di Sulawesi Selatan setelah kemerdekaan, yakni pada masa Orde Lama (1950-1966), Orde Baru (1966-1998), dan Era Reformasi (1998 – sekarang).

Pada masa Orde Lama, muncul berbagai konflik antar elite politik di Sulawesi Selatan. Terjadi persaingan antar elite dalam mendapatkan kekuasaan, baik karena perbedaan aliran politik maupun pandangan dalam mencapai tujuan bangsa sesudah kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, elite politik di daerah Sulawesi Selatan terbagi dalam dua golongan elite dalam masyarakat yang berbeda pandangan. *Pertama*, golongan federalis yang dipelopori oleh A. Massarapi, A.C. Manoppo, Baoesat A. Baso, dan Andi Azis, yang mendukung negara federalis. *Kedua*, golongan unitaris yang dipelopori oleh Yusuf Bauty, Makkarang, Moh Riri Amin Daud, Abd Rachman Tamma, R. Soekarto, Hamang, Aminuddin Muchlis, dan S. Sunari, yang membentuk wadah perjuangan yang disebut Biro PPRI (Pejuang Pengikut Republik Indonesia) di Polombangkeng, Takalar. Golongan unitaris menginginkan kembali ke NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan mendatangkan TNI (Tentara Nasional Indonesia) ke Sulawesi Selatan untuk menjaga keamanan (Mattulada, 1998).

Terjadinya perbedaan pandangan di antara dua golongan elite politik lokal tersebut menyebabkan kondisi politik di Sulawesi Selatan diwarnai dengan konflik politik. Terjadi perbedaan pandangan dan pertentangan antar elite politik dalam memperjuangkan kepentingannya. Sekitar tahun 1950 sampai 1965, di daerah Sulawesi Selatan terjadi pertentangan antar elite politik yang didasarkan atas perbedaan aliran politik. Disamping itu juga terjadi pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Semestas) di Sulawesi Selatan dan di daerah Sulawesi lainnya (Leirissa, 1991; dan Gonggong, 2004).

Terjadi juga konflik antar partai

yang berasaskan aliran politik dalam mendapatkan kekuasaan, baik sebelum maupun sesudah PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1955. Partai politik yang beraliran politik Islam, seperti MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), NU (Nahdatul Ulama), dan PSII (Partai Syarekat Islam Indonesia) bersaing dengan partai politik yang beraliran nasionalis dan komunis dalam memenangkan PEMILU (Sjamsuddin, 1984). Hasil PEMILU 1955 menunjukkan bahwa partai politik yang beraliran Islam memperoleh kemenangan 90 persen, sedangkan partai politik yang beraliran nasionalis, komunis, dan partai-partai kecil hanya membagi habis 10 persen sisa suara lainnya. Bahkan MASYUMI sendiri mampu memperoleh 72 persen suara (Gonggong, 2004:93).

Konflik antar elite politik di Sulawesi Selatan juga terjadi karena perbedaan pandangan dalam mengisi kemerdekaan. Pada tanggal 7 Agustus 1953, Komandan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) di Sulawesi Selatan, Abdul Kahar Muzakkar, menggabungkan pasukannya dan daerah yang dikuasainya ke dalam NII (Negara Islam Indonesia) yang dipimpin Kartosuwirjo yang berpusat di Jawa Barat. Dalam menopang tujuan NII didirikan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin langsung oleh Abdul Kahar Mauzakkar. Menurut Anhar Gonggong, munculnya gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan setidak-tidaknya disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, penolakan terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam penyelesaian masalah gerilya bekas pejuang kemerdekaan. *Kedua*, unsur budaya, yaitu *siri'* dan *pacce*, nilai yang dipegang teguh dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar. *Ketiga*, faktor agama, yaitu agama Islam yang dianut rakyat di Sulawesi Selatan (Gonggong, 2004:34).

Pemberontakan yang dilakukan oleh Abdul Kahar Muzakkar itu menimbulkan pro-kontra di kalangan elite politik di Sulawesi Selatan. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh Abdul Kahar Muzakkar mendapat dukungan dari berbagai

golongan masyarakat, seperti kaum elite bangsawan, ulama, pedagang, guru, dan petani. Di kalangan elite bangsawan, muncul dukungan dari Andi Selle (Mattola), Andi Sose, Andi Tenriadjeng, Andi Masse, dan Andi Patawari (Abdullah, 1991). Di kalangan ulama, muncul dukungan dari Haji Abdul Kadir Daud, Haji Abdul Rahman Ambo Dalle, dan Haji Abdul Muin.

Munculnya dukungan dari berbagai elite bangsawan menimbulkan pertanyaan, karena Abdul Kahar Muzakkar dikenal sebagai elite yang anti feodalisme. Bahkan kegagalan Abdul Kahar Muzakkar menjadi pemimpin tentara di Sulawesi Selatan, salah satunya, disebabkan oleh adanya penolakan dari elite bangsawan. Abdul Kahar Muzakkar dikhawatirkan akan melakukan pembersihan terhadap elite bangsawan yang bekerjasama dengan Belanda dan kelompok bangsawan sebagai satu kelas (Nasyaruddin & Mustafa eds., 2004:87-88).

Melihat dukungan yang besar dari berbagai kalangan masyarakat terhadap gerakan yang dilakukan oleh Abdul Kahar Muzakkar, muncul kekhawatiran dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat menempuh dua cara, yakni melalui perundingan dan operasi militer. Cara pertama didukung oleh kaum politisi blok Islam, yang dipimpin oleh Muhammad Natsir dan orang-orang partai MASYUMI. Cara kedua didukung oleh pimpinan Angkatan Perang/ Angkatan Darat (Gonggong, 2004:292-293).

Cara pertama dilakukan dengan perundingan secara damai. Tuntutan yang disampaikan oleh Abdul Kahar Muzakkar, seperti pembentukan wadah bagi bekas pejuang Sulawesi Selatan, terbentuklah lembaga KGSS (Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan), yang kemudian diubah menjadi CTN (Corps Tjadangan Nasional), yang dilantik pada tanggal 24 Maret 1951. Pembentukan CTN menimbulkan konflik dengan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Sulawesi). Pihak Abdul Kahar Muzakkar, selaku pimpinan CTN, menghendaki agar peresmian APRIS secara utuh dalam satu brigade, yaitu Brigade Hasanuddin. Pihak APRIS tetap

menghendaki peresmian CTN menjadi anggota APRIS dilakukan per batalyon.

Perbedaan pandangan itu tidak mendapatkan konsensus, sehingga konflik tetap berlangsung, sampai Abdul Kahar Muzakkar dan pasukannya meninggalkan rayon-rayon penampungan kemudian menuju hutan-hutan di Sulawesi Selatan. Walaupun Abdul Kahar Muzakkar memilih masuk hutan, namun sebagian anggotanya berhasil diresmikan sebagai anggota APRI, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Andi Selle Mattola dan pasukan yang dipimpinan Andi Sose (Gonggong, 2004; dan Tangke *et al.* eds., 2004).

Kebijakan pemerintah pusat yang melantik Andi Selle dan Andi Sose sebagai anggota APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) tidak disetujui oleh Abdul Kahar Muzakkar, dan tetap pada tuntutannya agar diresmikan sebagai anggota APRI di dalam satu brigade, yaitu Brigade Hasanuddin. Tuntutan itu tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat dan Abdul Kahar Muzakkar semakin marah. Ia memperkuat pasukannya dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah RI (Republik Indonesia).

Langkah yang ditempuh oleh Abdul Kahar Muzakkar juga menjadi awal terjadinya konflik antar elite politik lokal Sulawesi Selatan. Andi Selle dan Andi Sose, yang sebelumnya menjadi bagian dari gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh Abdul Kahar Muzakkar, memilih untuk bergabung dengan pasukan pemerintah RI. Kerasnya pendirian Abdul Kahar Muzakkar membuat pemerintah RI mengakhiri perundingan damai dan menempuh cara kedua, yakni operasi militer.

Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui dua periode, yakni periode Tentara Teritorial (TT) VII/Wirabuana (1951-1957) dan periode KODAM (Komando Daerah Militer) XIV/ Hasanuddin (1957-1965). Pada periode pertama, operasi dipimpin langsung oleh Panglima TT VII / Wirabuana, Kolonel Kawilarang. Dibentuk pasukan operasi militer yang disebut "Operasi Merdeka" untuk memburu pasukan Abdul Kahar Muzakkar. Strategi yang sama dilakukan

oleh pelanjut Kolonel Kawilarang, yaitu Gatot Subroto, yang membentuk “Operasi Halilintar” (Gonggong, 2004:312).

Berbagai strategi yang digunakan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) belum mampu menghancurkan kekuatan pasukan Abdul Kahar Muzakkar, sampai lahirnya pemberontakan PERMESTA (Perjuangan Semesta) di Sulawesi pada tanggal 2 Maret 1957 (Leirissa, 1991). Namun demikian, pengejaran terhadap Abdul Kahar Muzakkar tetap dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan. Di lingkungan KODAM XIV/Hasanuddin dibentuk Resimen Hasanuddin, yang dipimpin oleh Mayor Andi Muhammad Yusuf (Tangke *et al.* eds., 2004).

Setelah menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Staf KODAM beberapa bulan, Letnan Kolonel Andi Muhammad Yusuf menggantikan Letnan Kolonel Andi Mattalatta sebagai Panglima KODAM XIV/Hasanuddin pada tahun 1959. Periode kedua operasi militer (1959-1962) di Sulawesi Selatan dilaksanakan dengan membentuk tiga komando operasi, yakni: Operasi 45, Operasi Guntur, dan Operasi Kilat. Tiga komando tersebut dianggap berhasil memperlemah kekuatan gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar (Gonggong, 2004; dan Tangke *et al.* eds., 2004).

Keberhasilan dalam memecah kekuatan gerakan DI/TII tidak menyurutkan operasi militer TNI dalam mengejar Abdul Kahar Muzakkar. Melalui operasi *Tumpas-Kilat* yang dipimpin oleh Andi Muhammad Yusuf, serta dibantu dengan pasukan dari KODAM VI/Siliwangi (Jawa Barat), KODAM VII/Diponegoro (Jawa Tengah), dan KODAM VIII/Brawijaya (Jawa Timur), berhasil mengakhiri perlawanan DI/TII. Pasukan DI/TII terkepung dalam pelariannya di Sulawesi Tenggara dan Abdul Kahar Muzakkar tertembak dan wafat pada tanggal 3 Februari 1965 (Gonggong, 2004).

Upaya menghancurkan kekuatan gerakan DI/TII, yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar, menunjukkan adanya pelibatan elite-elite TNI yang berasal dari Sulawesi Selatan. Strategi yang diterapkan oleh

pemerintah pusat adalah menggunakan pendekatan ikatan provinsialisme dan famili (Gonggong, 2004:113). Konsekuensi dari pendekatan tersebut menyebabkan konflik antar elite politik lokal di Sulawesi Selatan tidak dapat dihindari.

Abdul Kahar Muzakkar, yang tidak puas dengan kebijakan politik pemerintah pusat, melakukan pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar diperhadapkan dengan pasukan TNI yang dipimpin oleh elite dari Sulawesi Selatan sendiri. Terjadi konflik antara Abdul Kahar Muzakkar dengan Andi Selle Mattola, Andi Sose, Hamid Gani/Usman Balo, Bahar Mattaliu, dan Saleh Sjahban yang pernah menjadi bagian dari pasukannya. Disamping itu juga terjadi konflik dengan Andi Mattalatta dan Andi Muhammad Yusuf, sahabat dan juniornya (Midding To’ Supu, 2005).

Konflik antar elite politik lokal juga terjadi antar Kolonel Andi Muhammad Yusuf dengan Andi Selle (pimpinan Batalyon 710) dalam pengangkatannya sebagai Panglima KODAM XIV/Hasanuddin. Andi Selle menganggap Andi Muhammad Yusuf bukanlah sosok perwira yang pantas menggantikan Andi Mattalatta. Penolakan Andi Selle juga disebabkan oleh sikap Andi Muhammad Yusuf yang dinilai anti feodalisme, sementara pimpinan batalyon dan jabatan strategis di dalam KODAM XIV/Hasanuddin didominasi oleh kelompok bangsawan yang dikenal sangat feodal. Andi Muhammad Yusuf juga dinilai menyinggung harga diri elite bangsawan di KODAM XIV/Hasanuddin, yang melarang memamakai gelar bangsawan, seperti *Andi*, *Puang*, dan *Karaeng*, dalam keadaan dinas (Gonggong, 2004:333; dan Tangke *et al.* eds., 2004:6).

Mendengar penolakan terhadap dirinya, Andi Muhammad Yusuf menawarkan perundingan damai dan mengunjungi Andi Selle di Pinrang. Perundingan berlangsung dalam suasana yang penuh kekeluargaan, bahkan Andi Muhammad Yusuf dan Andi Selle naik kendaraan bersama menuju rumah kediaman Bupati Pinrang, Haji Andi

Makkulau. Dalam perjalanan itu terjadilah peristiwa Pinrang tanggal 5 April 1964. Kendaraan yang ditumpangi oleh Andi Muhammad Yusuf dan Andi Selle tidak menuju kediaman rumah bupati, tetapi seakan-akan menuju ke Pare-Pare, kemudian ke Makassar.

Pasukan Andi Selle merasa pimpinannya diculik dan akan dibawa lari ke Makassar. Melihat situasi yang mencemaskan itu, pasukan Andi Selle yang dipimpin langsung oleh adiknya, Andi Napi, memerintahkan untuk menembak mobil panglima. Andi Muhammad Yusuf dan Andi Selle melompat dari mobil dan berhasil diselamatkan oleh pasukannya masing-masing. Siasat politik untuk membunuh Andi Muhammad Yusuf itu hanya berhasil menewaskan Komandan CPM (Corps Polisi Militer) Kolonel Sigiri, Komisaris Besar Polisi Marjaman terluka, dan Andi Patonangi terkena peluru (Tangke *et al.* eds., 2004:1-3).

Pembangkitan yang dilakukan oleh Andi Selle menyebabkan ia dipecat dari KODAM XIV/Hasanuddin dan dianggap pemberontak. Andi Selle bersama pasukannya terus dikejar sampai ia tertembak pada tanggal 12 September 1964. Seluruh anggota pasukannya secara perlahan menyerah dan sebagian bergabung dengan pasukan TNI.

Berhasilnya penyerbuan terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Selle dan Abdul Kahar Muzakkar, bersama pasukannya, mengubah suasana politik di Sulawesi Selatan. Stabilitas politik semakin baik dan konflik antar elite politik lokal di Provinsi Sulawesi Selatan tidak muncul lagi ke permukaan. Kondisi itu berlangsung sampai terjadinya pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru pada tahun 1966.

Pada masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998), konflik antar elite politik lokal di Sulawesi Selatan praktis tidak muncul ke permukaan. Situasi politik semakin kondusif dan pemerintahan daerah mulai berjalan normal. Sistem politik yang otoriter dan sentralistik, yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru, berhasil menekan sejumlah potensi konflik di tingkat lokal, khususnya konflik antar suku yang

dianggap sangat sensitif dan dapat menjadi sumber pemicu konflik sosial dan politik (Magenda, 1983). Proses pengambilan keputusan politik dikendalikan oleh pemerintah pusat dan masyarakat praktis tidak diberikan ruang politik yang memadai untuk mengungkapkan kepentingan politiknya (Pemda Sulsel, 1991; dan Latif, Majid & Taamin eds., 1999).

Konflik antar elite politik lokal, seperti yang terjadi pada masa sebelumnya, tidak muncul ke permukaan. Elite politik di tingkat lokal cenderung bersatu untuk membangun daerahnya dan menuntut kepada pemerintah pusat. Namun demikian, konflik yang bersifat kecil dan tidak terlalu berarti pernah terjadi ketika pengangkatan Prof. Dr. H. A. Amiruddin, Rektor UNHAS (Universitas Hasanuddin), sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1982. Muncul reaksi dari berbagai elite, khususnya elite militer (H. Andi Mattalatta dan H. Andi Sose) dan kelompok keturunan bangsawan, yang selama ini menduduki posisi gubernur di Sulawesi Selatan (We Onggang, 1998; dan Madjulekka ed., 2002).

Elite politik dari kalangan militer memberikan reaksi terhadap pengangkatan dan pemilihan Prof. Dr. H. A. Amiruddin sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan mempertanyakan asal-usul keturunan pemerintah dari keluarga Prof. Dr. H. A. Amiruddin. Pihak keluarga Prof. Dr. H. A. Amiruddin pun memberikan reaksi balik, namun tidak menimbulkan konflik yang keras. Pemerintah pusat tetap pada keputusannya, yakni mengangkat Prof. Dr. H. A. Amiruddin sebagai gubernur selama dua periode (Harahap *et al.*, 1999; dan wawancara dengan Prof. Dr. H. A. Amiruddin, 25/4/2005).

Situasi dan kondisi yang stabil itu berubah ketika kekuasaan politik rezim Orde Baru runtuh dan digantikan oleh kekuatan Orde Reformasi pada bulan Mei 1998. Masyarakat diberikan ruang politik yang semakin luas untuk menyampaikan aspirasi politik sesuai dengan kepentingannya (Rauf *et al.*, 2000).

Salah satu konsekuensi dari runtuhnya rezim Orde Baru yang otoriter dan

sentralistik, serta dibukanya ruang politik yang semakin luas, adalah munculnya kembali konflik antar elite politik lokal. Terjadi persaingan antara elite dalam mendapatkan kekuasaan, baik yang didasarkan atas suku, aliran politik, kedaerahan, maupun strata sosial.

Berbagai macam pola dan bentuk konflik antar elite dapat dilihat pada penyelenggaraan PEMILU (Pemilihan Umum), baik pada PEMILU legislatif, PILPRES (Pemilihan Presiden), lebih-lebih pada pelaksanaan PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah). Perbedaan pendapat, persaingan, pertentangan, dan konflik kekerasan terjadi di setiap momentum PEMILU, terutama dalam PILKADA, baik PILGUB (Pemilihan Gubernur) maupun PILKADA Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan (Nas, 2006; dan KPU, 2014).

KESIMPULAN

Konflik antar elite politik lokal senantiasa muncul dalam lanskap perpolitikan Indonesia. Dalam konteks sejarah konflik elite di Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan dua hal utama, yakni: *pertama*, terjadi kontinuitas pola konflik; dan *kedua*, terjadi pergeseran pola konflik.

Kontinuitas pola konflik antar elite politik lokal dapat dilihat dari konflik yang didasarkan atas ikatan wilayah dan suku, baik pada zaman pra penjajahan, zaman penjajahan, maupun zaman kemerdekaan. Konflik elite yang didasarkan pada ikatan wilayah dan kesukuan terlihat sangat dominan pada pemilihan pemimpin di era Reformasi (1998 - sekarang), terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Konflik antar elite politik lokal di Sulawesi Selatan juga menunjukkan terjadinya pergeseran pola konflik. Perebutan kekuasaan yang selama ini bersifat vertikal (konflik antar kelompok bangsawan dan masyarakat biasa yang berpendidikan dan berprestasi) berubah menjadi konflik horizontal, yakni antar kelompok kepentingan politik tanpa melihat strata sosial seorang calon secara signifikan.

Bibliografi

- Abdullah, Hamid. (1985). *Manusia Bugis Makassar*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Abdullah, Hamid. (1991). *Andi Pangeran Pettarani: Profil Pimpinan yang Manunggal dengan Rakyat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Abidin, Andi Zainal. (1999). *Capita Selektta Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Andaya, Leonard Y. (2004). *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*. Makassar: Penerbit Innawa, Terjemahan.
- Depdikbud RI [Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia]. (1985). *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Devas, Nick et al. (1999). *Keuangan Pemerintah Indonesia*. Jakarta: UI [Universitas Indonesia] Press.
- Geertz, Clifford [ed]. (1965). *Old Societies and New States*. New York: The Free Press.
- Gonggong, Anhar. (2004). *Abdul Qahhar Muzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hamid, Abu et al. (2005). *Siri' & Pesse': Harga diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Harahap, Rudi et al. (1999). *A. Amiruddin: Nahkoda dari Timur*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Latimodjong.
- Harvey, Barbara S. (1989). *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta: Grafiti Pers, Terjemahan.
- Kesuma, Andi Ima. (2004). *Migrasi & Orang Bugis*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- KPU [Komisi Pemilihan Umum]. (2014). "Evaluasi Hasil Pemilu Legislatif 2014 di Sulawesi Selatan". *Laporan Tidak Diterbitkan*. Makassar: KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- Latif, Abd. (2014). "Diplomasi dan Ekspedisi Militer Belanda terhadap Tiga Kerajaan Lokal di Sulawesi Selatan, 1824-1860" dalam *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol.7(2) November. Bandung: Minda Masagi Press, UNHAS Makassar, dan UNIPA Surabaya. Tersedia [online] juga di: www.sosiohumanika-jpssk.com
- Latif, A., A. Majid & Jamil H. Taamin [eds]. (1999). *Sulawesi Selatan: Dari Andi Pangeran Pettarani sampai H.Z.B. Palaguna*. Ujung Pandang: Pustaka Pembangunan.
- Leirissa, R.Z. (1991). *PRRI-Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Madjulekka, Rusman [ed]. (2002). *80 Tahun A.A. Rifai: Catatan Kehidupan & Perjuangan*. Makassar: Intermedia Publishing.
- Magenda, Burhan D. (1983). "Ethnicity and State-Building in Indonesia: The Cultural Base of the New Order" dalam Remo Guidieri et al. [eds]. *Ethnicities and Nations: Processes of Interethnic Relations in Latin America, Southeast Asia, and the Pacific*. Austin: University of Texas Press.
- Malley, Michael. (2001). "Daerah: Sentralisasi dan

- Perlawanan" dalam Donald K. Emerson [ed]. *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. Jakarta: Gramedia bekerja sama dengan The Asia Foundation Indonesia, Terjemahan.
- Mappangara, Suriadi. (2014). "Perjanjian Tellumpocoe Tahun 1582: Tindak-Balas Kerajaan Gowa terhadap Persekutuan Tiga Kerajaan di Sulawesi Selatan" dalam *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, 7(1) Mei. Bandung: Minda Masagi Press, UNHAS Makassar, dan UNIPA Surabaya. Tersedia [online] juga dalam: www.sosiohumanika-jpsk.com
- Maryanov, Gerald S. (2000). "Hubungan Pusat dan Daerah: Dari Ketergantungan Menuju Keseimbangan" dalam Muhammad A.S. Hikam & Syarif Hidayat [eds]. *Indonesia Menapak Abad 21: Kajian Ekonomi dan Politik*. Jakarta: Penerbit LIPI [Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia].
- Marzuki, Laica. (1995). *Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat)*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Mas'ud Rahman, Darmawan. (1988). "Puang dan Daeng di Daerah Mandar". *Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan*. Ujung Pandang: Program Pascasarjana UNHAS [Universitas Hasanuddin].
- Mattulada. (1975). *Latoa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Jakarta: Penerbit Pustaka Jaya bekerjasama dengan UNHAS [Universitas Hasanuddin].
- Mattulada. (1998). *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Midding To' Supu, Mirdan. (2005). *Mayjen TNI (Purn) H. Andi Matalatta: Dari Atlet Serba Bisa hingga Pejuang Sejati*. Yogyakarta: Bio Pustaka.
- Muhtamar, Shaff. (2004). *Masa Depan Warisan Luhur Kebudayaan Sulawesi Selatan: Mengurai Akar Nestapa Kebudayaan*. Makassar: Dewan Sulawesi.
- Mukhlis [ed]. (1986). *Dinamika Bugis-Makassar*. Jakarta: Pusat Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan YIIS [Yayasan Ilmu-ilmu Sosial].
- Nas, Jayadi. (2006). "Konflik Elit Politik Lokal: Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Periode 2003-2008". *Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan*. Jakarta: Program Pascasarjana UI [Universitas Indonesia].
- Nasyaruddin, Anwar & Moh Yahya Mustafa [eds]. (2004). *Jejak-jejak Radikal Kahar Muzakkar: Dia Tetap Membangkang*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Pababbari, Musafir. (2003). *Perilaku Politik Elit Agama di Sulawesi Selatan*. Makassar: Padat Daya.
- Paeni, Mukhlis et al. (2002). *Batara Gowa: Messianisme dalam Gerakan Sosial di Makassar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pelras, Chistian. (1996). *The Bugis*. Cambiridge, USA: Blackwell.
- Pemda Sulsel [Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan]. (1991). *Sejarah Perkembangan Pemerintahan*. Ujung Pandang: Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan.
- Poelinggomang, Edward L. (2004). *Perubahan Politik & Hubungan Kekuasaan: Makassar, 1906-1942*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rauf, Maswadi. (2000). *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas RI [Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia].
- Rauf, Maswadi et al. (2000). *Memastikan Arah Baru Demokrasi*. Jakarta: Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia] kerjasama dengan Mizan.
- Sewang, Ahmad M. (2005). *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. (1984). *PNI dan Kepolitikannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. (1989a). *Dinamika Sistem Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. (1989b). *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sulistyo, Bambang. (2014). "Konflik, Kontrak Sosial, dan Pertumbuhan Kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Selatan" dalam *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, 7(1) Mei. Bandung: Minda Masagi Press, UNHAS Makassar, dan UNIPA Surabaya. Tersedia [online] juga dalam: www.sosiohumanika-jpsk.com
- Tangke, A. Wanua et al. [eds]. (2004). *Andi Salle Konflik M. Yusuf: Menyingkap Tragedi 5 April 1964 di Pinrang*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Wawancara dengan Prof. Dr. H. A. Amiruddin, mantan Rektor UNHAS (Universitas Hasanuddin) dan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, di Kota Makassar, pada tanggal 25 April 2005.
- We Onggang, Alif. (1998). *Tentang Sejumlah Orang Sulawesi Selatan, 1998*. Jakarta: Penerbit Yamami.



Suasana PEMILU pada Masa Reformasi di Sulawesi Selatan
(Sumber: www.google.com, 9/10/2014)

Berbagai macam pola dan bentuk konflik antar elite dapat dilihat pada penyelenggaraan PEMILU (Pemilihan Umum), baik pada PEMILU legislatif, PILPRES (Pemilihan Presiden), lebih-lebih pada pelaksanaan PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah). Perbedaan pendapat, persaingan, pertentangan, dan konflik kekerasan terjadi di setiap momentum PEMILU, terutama dalam PILKADA, baik PILGUB (Pemilihan Gubernur) maupun PILKADA Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.